

PENELITIAN ASLI

EVALUASI PRESERVASI DAN KONSERVASI DI PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Fauzziyah Irwani Putri¹, Marlini¹, Rini Asmara¹

¹Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, Padang, Sumatera Barat, 25131, Indonesia

Article Info

Article History

Received : 30 November 2025

Revised : 13 Desember 2025

Accepted : 19 Desember 2025

Published : 30 Desember 2025

Keywords: Pelestarian Bahan Pustaka; Preservasi; Konservasi; Perpustakaan Khusus

Corresponding Author:

Fauzziyah Irwani Putri

Email: putri.fi03@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan preservasi dan konservasi di Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatra Barat dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan dua staf perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan telah menerapkan beberapa praktik dasar preservasi, seperti penyampulan, perbaikan ringan, pemeriksaan fisik koleksi baru, serta pengendalian lingkungan menggunakan AC stabil dan *thermo-hygrometer* untuk menjaga suhu 20–23°C dan kelembapan 45–55%, yang selaras dengan prinsip *environmental control* IFLA. Namun, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah kendala signifikan, antara lain ketiadaan kebijakan atau SOP tertulis, keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas konservasi lanjutan, serta rendahnya literasi pemustaka yang menyebabkan kerusakan koleksi akibat penggunaan. Upaya digitalisasi telah dilakukan, tetapi belum memenuhi prinsip *digital preservation* karena terkendala kapasitas sistem, ketidakstabilan situs web, dan minimnya dukungan teknis. Secara keseluruhan, pelaksanaan preservasi dan konservasi di perpustakaan masih berada pada tingkat dasar dan belum sepenuhnya sesuai standar IFLA, sehingga diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan fasilitas konservasi yang memadai, serta pembangunan infrastruktur digital yang berkelanjutan agar pelestarian koleksi dapat dilakukan secara sistematis dan mendukung keberlangsungan informasi kelembagaan.

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of preservation and conservation at the West Sumatra Provincial DPRD Secretariat Library using a descriptive qualitative approach through in-depth interviews with two library staff members. The results of the study show that the library has implemented several basic preservation practices, such as binding, minor repairs, physical inspection of new collections, and environmental control using stable air conditioning and thermo-hygrometers to maintain a temperature of 20–23°C and humidity of 45–55%, which is in line with IFLA environmental control principles. However, the study also identified a number of significant obstacles, including the absence of written policies or SOPs, budget constraints, a lack of advanced conservation facilities, and low user literacy, which has led to damage to the collection due to misuse. Digitalisation efforts have been made, but they do not yet meet the principles of digital preservation due to system capacity constraints, website instability and a lack of technical support. Overall, the implementation of preservation and conservation in libraries is still at a basic level

and does not yet fully comply with IFLA standards. Therefore, it is necessary to strengthen policies, improve human resource competencies, provide adequate conservation facilities, and develop sustainable digital infrastructure so that collection preservation can be carried out systematically and support the sustainability of institutional information.

Journal Net. Library and Information (JNLI)

E.ISSN: 3089-5464

Vol. 2 No. 2 Desember, 2025 (Hal. 55-66)

Homepage: <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/jnli>

DOI: <https://doi.org/10.51544/jnli.v2i2.6564>

How To Cite: Putri, F. I., Marlina, M., & Asmara, R. (2025). Preservasi dan Konservasi di Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. *Journal Net. Library and Information (JNLI)*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.51544/jnli.v2i2.6564>



Copyright © 2025 by the Authors, Published by Program Studi: Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Komunikasi dan Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 Licence ([Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)).

1. Pendahuluan

Preservasi dan konservasi bahan pustaka merupakan dua aspek penting dalam pengelolaan perpustakaan modern, terutama pada era ketika arus informasi terus meningkat secara eksponensial dan keberlanjutan koleksi menjadi semakin terancam oleh faktor fisik maupun digital (Elnadi, 2021). UNESCO mencatat bahwa lebih dari 60% koleksi pustaka dunia berada dalam kondisi rentan akibat usia bahan, paparan lingkungan, serta kurangnya praktik pemeliharaan yang memadai. Di Indonesia, tantangan serupa juga muncul, terutama pada perpustakaan yang mengelola koleksi langka maupun dokumen institusional yang menjadi sumber informasi primer bagi kegiatan pemerintahan, penelitian, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan survei Badan Perpustakaan Nasional pada tahun 2023, sekitar 45% perpustakaan di Indonesia melaporkan kerusakan fisik koleksi akibat kelembapan, serangga, serta penanganan yang kurang tepat (Sudiarti dkk., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan preservasi dan konservasi agar kesinambungan informasi dapat terjamin dalam jangka panjang.

Perpustakaan khusus sebagai lembaga yang menyediakan koleksi yang sangat spesifik dan berfungsi mendukung kebutuhan organisasi induknya, memiliki tanggung jawab yang lebih kompleks dibandingkan perpustakaan umum (Ilmi & Sulistyoningtyas, 2022). Koleksi yang dikelola tidak hanya mencakup buku, tetapi juga dokumen-dokumen kelembagaan, laporan tahunan, notulen rapat, arsip kebijakan, serta materi informasi yang bersifat strategis. Kerusakan atau kehilangan satu dokumen saja dapat mengganggu kontinuitas administrasi dan akurasi informasi kelembagaan (Ramadhiani dkk., 2023).

Oleh karena itu, perpustakaan khusus dituntut untuk menerapkan standar preservasi dan konservasi yang lebih ketat.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa preservasi dan konservasi masih menjadi tantangan di banyak perpustakaan. Kautsar dkk. (2022) menemukan bahwa kerusakan koleksi di Perpustakaan sering kali terjadi akibat lingkungan fisik yang belum optimal. Ilimi & Sulistyoningtyas (2022) menegaskan bahwa strategi preservasi di Perpustakaan memerlukan dukungan kebijakan dan kompetensi pustakawan. Ikegwuiro dkk. (2020) bahkan menekankan bahwa perpustakaan khusus memiliki tantangan lebih besar karena koleksi mereka bersifat dokumentasi resmi yang tidak dapat digantikan. Dalam penelitian di beberapa perpustakaan lembaga tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan khusus belum memiliki pedoman preservasi yang tertulis atau prosedur kerja standar terkait penanganan bahan pustaka.

Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatra Barat memegang peran penting dalam menyediakan informasi yang mendukung kinerja legislatif daerah. Perpustakaan ini mengelola berbagai jenis koleksi yang mencakup dokumen peraturan daerah, risalah rapat, laporan kinerja, naskah akademik, hingga arsip sejarah pembentukan kebijakan publik di tingkat provinsi. Berdasarkan data internal tahun 2025, Perpustakaan DPRD memiliki koleksi bahan pustaka berupa 1.833 monografi dan 189 dokumen peraturan. Dari keseluruhan koleksi tersebut, sekitar 20 buku mengalami kerusakan, seperti kertas yang rapuh, noda akibat jamur, serta sampul yang mulai terlepas. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh mengenai efektivitas program preservasi dan konservasi yang telah diterapkan (Ramadhiani dkk., 2023).

Berdasarkan observasi awal, Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat hanya memiliki dua staf pustakawan dan telah mengikuti pelatihan konservasi dasar. Namun dalam upaya preservasi dan konservasi, Perpustakaan masih membutuhkan penguatan dari sisi kebijakan, fasilitas, maupun peningkatan kapasitas pustakawan. Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut, evaluasi terhadap praktik preservasi dan konservasi di Perpustakaan Khusus DPRD Provinsi Sumatra Barat menjadi sangat penting. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem yang berjalan, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan keberlanjutan koleksi serta kualitas layanan informasi kepada para pemangku kepentingan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai sejauh mana perpustakaan telah menerapkan prinsip-prinsip preservasi dan konservasi, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat pengelolaan koleksi di masa mendatang.

2. Landasan Teori

1. Perpustakaan Khusus

Perpustakaan khusus merupakan jenis perpustakaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi kelompok pengguna tertentu dalam suatu lembaga, organisasi, atau bidang profesi. *Preservation and Conservation Section – IFLA* (2019) menyatakan bahwa perpustakaan khusus memiliki karakteristik berupa koleksi yang

sangat terfokus, layanan yang selektif, serta penyediaan informasi yang mendukung fungsi inti lembaga. Dalam konteks lembaga pemerintahan dan legislatif, perpustakaan khusus tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bahan pustaka, tetapi juga sebagai pusat dokumentasi kelembagaan yang menyimpan produk hukum, risalah, arsip kebijakan, serta kajian yang diperlukan dalam proses legislasi. Perpustakaan khusus juga memiliki nilai strategis dalam menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama bagi lembaga negara yang membutuhkan sumber referensi terpercaya dalam pengambilan kebijakan (Bahrudin, 2019).

Di sisi lain, perpustakaan khusus menghadapi tantangan yang berbeda dari perpustakaan umum, sekolah, maupun perguruan tinggi. Dalam *American Library Association-ALA* (2023) menunjukkan bahwa perpustakaan khusus sering mengelola dokumen unik yang tidak dapat digantikan, sehingga aspek keamanan, pelestarian, dan kerahasiaan informasi menjadi prioritas utama. Tantangan lain meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi spesifik, kebutuhan digitalisasi dokumen resmi, serta tuntutan penyediaan informasi yang cepat bagi pemangku kebijakan. Dengan kondisi tersebut, perpustakaan seperti Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memegang peran penting dalam mendukung tugas legislasi, pengawasan, dan representasi melalui penyediaan akses informasi yang relevan, terpercaya, dan terkelola secara profesional.

2. Preservasi

Preservasi bahan pustaka merupakan serangkaian tindakan preventif yang bertujuan memperlambat atau mencegah terjadinya kerusakan pada koleksi, sehingga usia pakai dan nilai informasinya dapat terjaga dalam jangka panjang. Fatmawati (2018) menjelaskan bahwa preservasi mencakup berbagai upaya perlindungan terhadap koleksi melalui pengendalian lingkungan, perawatan fisik, penyimpanan yang tepat, serta kebijakan penanganan koleksi yang aman. Ruang lingkup preservasi tidak hanya berfokus pada bahan pustaka itu sendiri, tetapi juga meliputi pengelolaan fasilitas, peralatan, dan prosedur kerja yang mendukung terciptanya kondisi konservatif bagi koleksi. Dalam perspektif serupa, Makinde dkk. (2022) menegaskan bahwa preservasi merupakan fondasi penting bagi perpustakaan karena tindakan ini memastikan keberlanjutan akses dan meminimalkan kerusakan sebelum terjadi, terutama pada koleksi yang bersifat unik, langka, atau memiliki nilai administratif dan historis.

Dalam praktiknya, preservasi diwujudkan melalui berbagai tindakan pencegahan yang bersifat praktis dan berorientasi pada pengendalian risiko. Pengaturan suhu dan kelembaban menjadi aspek penting karena kondisi lingkungan yang stabil dapat mengurangi laju pelapukan kertas dan bahan organik lainnya (Pratama dkk., 2025). Selain itu, tata ruang yang bersih, ventilasi yang baik, serta pemantauan intensitas cahaya berperan langsung dalam menjaga kualitas fisik koleksi. Tindakan lain seperti pencegahan hama, penggunaan rak dan boks penyimpanan yang sesuai standar, serta edukasi pemustaka mengenai cara menangani koleksi turut menjadi strategi penting dalam preservasi (Syahfitri, 2023). Perpustakaan juga perlu menerapkan standar

internasional maupun lokal terkait penyimpanan, seperti menjaga kebersihan ruang koleksi, mengatur jarak antar rak, serta menggunakan wadah penyimpanan bebas asam (Makinde dkk., 2022). Dengan demikian, preservasi menjadi langkah awal dan utama dalam menjaga ketahanan koleksi sebelum tindakan konservasi atau restorasi diperlukan.

3. Konservasi

Konservasi bahan pustaka merupakan serangkaian tindakan teknis untuk mempertahankan kondisi fisik koleksi dan memperlambat kerusakan yang tidak dapat dicegah melalui preservasi saja. Fatmawati (2018) menekankan bahwa konservasi mencakup perawatan minor hingga moderat untuk menjaga stabilitas struktural, keterbacaan, serta keberlanjutan akses tanpa mengubah bentuk asli bahan pustaka. Tindakan yang dilakukan dapat berupa perawatan rutin, perbaikan sobekan, penyampulan, pelaminasian, dan penjilidan ulang, dengan pemilihan teknik yang harus disesuaikan dengan kondisi koleksi. Selain itu, pentingnya pembersihan debu, pemeriksaan fisik, dan penggantian sampul sebagai langkah dasar agar kerusakan tidak berkembang, sementara tindakan seperti pelaminasian atau penjilidan ulang harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu keaslian dokumen (Syahfitri, 2023).

Pemilihan bahan bebas asam dan teknik konservasi berstandar menjadi aspek krusial untuk memastikan keamanan jangka panjang koleksi. Makinde dkk. (2022) menyebutkan bahwa bahan konservasi harus tahan lama, netral, dan kompatibel dengan media dokumen, seperti penggunaan perekat netral, kertas berserat panjang, serta boks arsip sesuai standar konservasi. Pedoman serupa diterapkan di Indonesia agar tindakan konservasi tidak menimbulkan kerusakan tambahan. Menurut Ramadhiani dkk. (2023), kegiatan konservasi perlu diperkuat karena banyak perpustakaan menghadapi kerusakan fisik akibat penggunaan intensif dan kondisi lingkungan yang kurang optimal. Dengan demikian, konservasi bukan sekadar tindakan teknis, tetapi bagian integral dari manajemen koleksi yang harus didukung oleh kebijakan, tenaga terlatih, dan fasilitas memadai.

4. Pelestarian Digital

Pelestarian digital merupakan upaya menjaga keberlanjutan akses terhadap informasi digital melalui kebijakan, prosedur, dan strategi teknis yang berorientasi jangka panjang. Pelestarian digital tidak hanya mencakup proses konversi dokumen fisik ke bentuk digital, tetapi juga memastikan agar file tetap dapat dibuka dan digunakan meskipun terjadi perubahan perangkat keras, perangkat lunak, atau format digital (Fatmawati, 2018). Karena itu, pelestarian digital menekankan aspek keberlanjutan, keandalan, dan keamanan data. Konsep ini berbeda dari digitalisasi yang sekadar memindai dokumen ke format digital; digital preservation mencakup pengelolaan file secara berkelanjutan melalui penyimpanan berstandar, metadata yang lengkap, dan strategi pemeliharaan seperti migrasi format. Digitalisasi tanpa dukungan sistem manajemen data yang memadai berisiko menyebabkan kerusakan file, korupsi data, atau hilangnya informasi (Pratama dkk., 2025).

Standar digitalisasi menuntut kualitas pemindaian yang baik, penggunaan format file berkelanjutan seperti TIFF atau PDF/A, serta sistem penyimpanan berlapis yang aman

(Makinde dkk., 2022). Di Indonesia, praktik umum menetapkan pemindaian minimal 300 dpi, pelabelan metadata, dan sistem penelusuran yang mendukung akses dokumen digital secara optimal. Namun, pelestarian digital tetap menghadapi tantangan seperti degradasi file, perubahan teknologi yang cepat, kurangnya infrastruktur, dan keterbatasan sumber daya manusia (Srikana dkk., 2023). Tantangan-tantangan ini menjadi penting untuk menilai apakah digitalisasi di Perpustakaan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi prinsip pelestarian digital atau masih sebatas pemindaian tanpa dukungan sistem yang memadai.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi, proses, serta pelaksanaan preservasi dan konservasi di Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatra Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti melalui penggalian informasi secara langsung dari sumbernya (Sugiyono, 2020). Data utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan koleksi, yaitu kedua pustakawan Perpustakaan Sekretariat DPRD Sumatera Barat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi jawaban informan secara fleksibel namun tetap berada dalam koridor fokus penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung selama 6 bulan terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data pendukung penelitian, lalu disimpulkan.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan preservasi dan konservasi di Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatra Barat telah berjalan, tetapi belum memenuhi standar praktik terbaik sebagaimana direkomendasikan dalam IFLA. IFLA merupakan pedoman internasional yang disusun oleh *International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA) sebagai standar dasar dalam merawat, menangani, dan melestarikan bahan pustaka. Prinsip-prinsip ini memberikan arahan bagi perpustakaan agar dapat menjaga keberlanjutan koleksi melalui praktik yang terukur dan berorientasi pada pencegahan kerusakan.

Dalam *Preservation and Conservation Section – IFLA* tahun 2019 menekankan bahwa pelestarian koleksi harus dimulai dari upaya menjaga kondisi lingkungan yang stabil, seperti pengaturan suhu ideal sekitar 18–22°C dan kelembapan relatif 45–55%, serta meminimalkan paparan cahaya, debu, dan polusi. Pedoman ini juga menyoroti pentingnya penanganan fisik bahan pustaka secara benar, karena sebagian besar kerusakan terjadi akibat perilaku manusia. Prosedur penanganan yang tepat meliputi membuka buku dengan hati-hati, tidak melipat halaman, tidak memberikan tekanan berlebih pada punggung buku, serta menggunakan alat bantu seperti pembatas buku yang sesuai. Selain itu, IFLA menekankan perlunya penyimpanan koleksi yang benar, menggunakan rak yang kuat, bahan penyimpanan bebas asam, serta pengaturan jarak

antar buku agar tidak terlalu rapat. Prinsip lainnya adalah pentingnya program pemeliharaan rutin seperti pembersihan debu, inspeksi berkala, dan dokumentasi kondisi koleksi. Pedoman ini juga mencakup perlunya kebijakan preservasi yang tertulis, pelatihan staf secara berkelanjutan, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana, baik banjir, kebakaran, maupun kerusakan akibat kelembapan ekstrim.

1. Kebijakan SOP

Salah satu temuan utama adalah tidak adanya kebijakan resmi mengenai pelestarian koleksi Informan 1 secara langsung menyatakan bahwa:

“Di perpustakaan DPRD belum ada kebijakan, SOP atau pedoman khusus dalam preservasi dan konservasinya” (wawancara 3 Desember 2025).

Ketiadaan kebijakan tertulis tersebut mengindikasikan bahwa perpustakaan belum memiliki kerangka normatif yang menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian kegiatan pelestarian jangka panjang. Kondisi ini tidak sejalan dengan ketentuan IFLA, yang menekankan pentingnya *written preservation policy* sebagai dasar dalam mengelola risiko kerusakan koleksi secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan preservasi di Perpustakaan DPRD masih belum didukung oleh pedoman yang terstruktur. Situasi ini berpotensi menghambat konsistensi dan efektivitas upaya pelestarian, terutama dalam konteks pengelolaan koleksi yang memerlukan perencanaan strategis berbasis kebijakan.

2. Perencanaan preservasi dan konservasi

Dari sisi perencanaan, kegiatan preservasi dan konservasi di perpustakaan sebenarnya sudah melakukan evaluasi tahunan terhadap kondisi koleksi. Informan 1 menjelaskan bahwa rencana kerja disusun dengan cara:

“Perencanaan kegiatan preservasi dan konservasi dilakukan setiap tahun dengan terlebih dahulu mengevaluasi kondisi koleksi melalui pengecekan fisik dan kegiatan pengolahan rutin. Dari hasil evaluasi tersebut, perpustakaan menyusun daftar koleksi yang membutuhkan penanganan prioritas, seperti koleksi yang mulai rapuh, kotor, atau memerlukan perbaikan ringan.” (wawancara 3 Desember 2025).

Hal ini sudah sejalan dengan rekomendasi IFLA yang menekankan pemantauan berkala sebagai bagian dari program preservasi. Namun, informan 2 menambahkan bahwa:

“Perencanaan tetap terbatas oleh anggaran sehingga kegiatan lebih difokuskan pada tindakan dasar, seperti pembersihan koleksi, perbaikan sederhana pada jilidan atau sampul, serta pengaturan kondisi ruang simpan” (wawancara 3 Desember 2025).

Berdasarkan hasil evaluasi, perencanaan preservasi dan konservasi di Perpustakaan DPRD telah menunjukkan adanya upaya sistematis melalui pelaksanaan evaluasi tahunan terhadap kondisi fisik koleksi. Langkah ini sejalan dengan rekomendasi IFLA mengenai pentingnya pemantauan berkala sebagai dasar penentuan prioritas penanganan. Evaluasi tersebut memungkinkan perpustakaan mengidentifikasi koleksi yang memerlukan perhatian, terutama bahan pustaka yang mengalami kerapuhan, kotoran, atau kerusakan ringan sehingga dapat segera dilakukan intervensi dasar. Namun, proses perencanaan tersebut masih menghadapi keterbatasan yang signifikan. Faktor anggaran menyebabkan

kegiatan preservasi lebih terfokus pada tindakan dasar dibandingkan penerapan strategi preventif yang lebih komprehensif. Selain itu, penetapan prioritas penanganan belum didukung oleh analisis risiko yang sistematis sebagaimana dianjurkan oleh IFLA. Praktik yang berjalan masih bersifat sederhana dan intuitif, tanpa menggunakan metode formal seperti penilaian nilai informasi atau identifikasi tingkat ancaman kerusakan.

3. Prioritas Koleksi

Pada aspek prioritas koleksi, informan 1 menegaskan bahwa:

“Buku-buku yang mengalami kerusakan sedang, seperti buku yang lepas dari kulitnya itu yang dijadikan prioritas sekarang. Sementara koleksi yang rusak berat disisihkan terlebih dahulu” (wawancara 3 Desember 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perpustakaan cenderung memprioritaskan koleksi yang masih memungkinkan untuk diperbaiki secara cepat dan ekonomis. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan pedoman IFLA yang menekankan bahwa prioritas preservasi seharusnya ditentukan berdasarkan nilai informasi, tingkat penggunaan, tingkat risiko kerusakan, serta urgensi pelestarian, bukan semata-mata pada tingkat kemudahan penanganan fisik. Dengan kata lain, karya yang memiliki signifikansi tinggi atau risiko kehilangan permanen mestinya mendapatkan perhatian lebih awal, meskipun kerusakannya lebih berat atau penanganannya lebih kompleks. Sementara itu, Informan 2 menjelaskan bahwa:

“Koleksi yang benar-benar tidak layak akan disusutkan atau dimusnahkan sesuai ketentuan” (wawancara 3 Desember 2025).

Proses penyusutan atau pemusnahan koleksi ini memang merupakan bagian dari manajemen koleksi yang umum dilakukan di perpustakaan. Namun, sesuai dengan standar IFLA, tindakan tersebut idealnya didahului oleh dokumentasi yang memadai, justifikasi kelayakan, serta analisis risiko dan nilai guna untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dilakukan secara akuntabel dan transparan. Tanpa proses dokumentasi yang memadai, terdapat risiko hilangnya rekam jejak koleksi dan lemahnya pertanggungjawaban terhadap kebijakan pelestarian jangka panjang.

4. Pelaksanaan Preservasi dan Konservasi Bahan Fisik

Terkait pelaksanaan preservasi, Perpustakaan Sekretariat DPRD Sumatera Barat sudah melakukan beberapa langkah preventif yang sesuai dengan standar. Informan 1 menyebutkan bahwa:

“Kegiatan yang telah dilakukan disini seperti penyampulan, peleman buku, penjilidan kembali buku yang terlepas dari covernya, pemberian silica gel di tiap rak, dan pengendalian suhu 20–23°C” (wawancara 3 Desember 2025).

IFLA merekomendasikan agar perpustakaan menjaga stabilitas suhu, mengurangi kelembapan, mencegah debu, dan mengupayakan penanganan fisik yang baik. Dengan demikian, langkah-langkah ini sudah berada dalam jalur yang benar. Informan 2 memperkuat pernyataan tersebut dengan menegaskan bahwa:

“Pengaturan lingkungan dilakukan menggunakan AC stabil dan thermo-hygrometer untuk memastikan suhu 20–23°C dan kelembapan 45–55%” (wawancara 3 Desember 2025).

Hal ini merupakan praktik yang sesuai dengan prinsip IFLA mengenai *environmental control*, yaitu menjaga kestabilan suhu dan kelembapan sebagai faktor kunci dalam memperlambat proses degradasi bahan pustaka. Upaya ini mencerminkan kesadaran institusi akan pentingnya menciptakan kondisi lingkungan yang terkendali secara konsisten untuk mendukung pelestarian koleksi jangka panjang.

Selain itu, prosedur penerimaan bahan pustaka baru di perpustakaan turut memperlihatkan keselarasan dengan rekomendasi IFLA, khususnya dalam hal pemeriksaan fisik awal. Praktik ini mencerminkan upaya institusi untuk memastikan bahwa setiap bahan pustaka yang masuk telah memenuhi persyaratan kualitas dan kondisi fisik yang layak sebelum diolah lebih lanjut. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Informan 2 yang menyebutkan bahwa:

“Prosedurnya dilakukan satu per satu untuk melihat ada buku yang cacat atau tidak dengan memfoto dan cek tiap lembar fisiknya” (wawancara 3 Desember 2025).

Pemeriksaan awal ini sangat penting karena IFLA menekankan bahwa setiap bahan pustaka harus dinilai kondisi fisiknya sebelum masuk ke koleksi. Namun, pada aspek konservasi tingkat lanjut, perpustakaan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan seperti fumigasi atau deasidifikasi. Informan 1 menyatakan secara langsung bahwa:

“Belum pernah dilakukan karena untuk melakukan hal tersebut butuh anggaran yang cukup besar” (wawancara 3 Desember 2025).

Informan 2 juga menambahkan:

“Belum ada, dari dulu sampai sekarang belum ada karena bahannya mahal” (wawancara 3 Desember 2025).

Keterbatasan ini menunjukkan adanya *gap* antara praktik lapangan dan standar internasional. IFLA menggarisbawahi bahwa konservasi lanjutan diperlukan untuk mengatasi kerusakan berat, terutama koleksi arsip dan dokumen bersejarah. Ketidakmampuan perpustakaan melaksanakan hal ini menjadi tantangan utama bagi pelestarian koleksi jangka panjang.

Risiko kerusakan koleksi juga lebih banyak berasal dari faktor manusia. Informan 1 mengatakan bahwa:

“Faktor utamanya adalah manusia... terkadang sudah robek, terlipat, atau terkena tumpahan kopi” (wawancara 3 Desember 2025).

Pernyataan ini selaras dengan temuan IFLA yang menyebutkan bahwa penanganan yang buruk oleh pengguna merupakan penyebab kerusakan paling umum di perpustakaan. Namun, perpustakaan tidak memiliki mekanisme denda atau sanksi sehingga perilaku pengguna tidak terkendali sebagaimana hasil wawancara oleh informan 2:

“Apalagi di sini tidak ada denda ataupun kebijakan yang memberatkan pemustaka, sehingga saat dikembalikan buku terkadang sudah robek di bagian halamannya, atau ada buku yang terlipat yang membuat buku itu cepat rapuhnya” (wawancara 3 Desember 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi penggunaan, seperti sanksi

atau aturan peminjaman yang lebih ketat, berdampak pada rendahnya kepedulian sebagian pemustaka terhadap kondisi fisik koleksi. Situasi tersebut mempertegas pentingnya program edukasi pemustaka untuk meningkatkan kesadaran mengenai cara memperlakukan bahan pustaka secara benar. Langkah ini sejalan dengan rekomendasi IFLA yang menekankan bahwa pelestarian tidak hanya bergantung pada tindakan teknis pustakawan, tetapi juga pada perilaku pengguna sebagai bagian integral dari upaya preservasi jangka panjang.

Kemudian, pada aspek digitalisasi, perpustakaan telah mulai melakukan pemindaian dokumen hukum sebagai bagian dari upaya pelestarian koleksi. Namun, proses ini masih menghadapi sejumlah kendala teknis yang menghambat optimalisasi *digital preservation*. Informan 1 menjelaskan bahwa:

“Kendalanya adalah situs web yang selalu error dari atasan” (wawancara 3 Desember 2025),

sedangkan informan 2 menambahkan bahwa:

“Untuk upload file susah karena batas minimal ukuran file sangat kecil” (wawancara 3 Desember 2025).

Kedua pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa infrastruktur digital yang tersedia belum memadai, baik dari segi stabilitas sistem maupun kapasitas penyimpanan. Padahal, IFLA menekankan bahwa digital preservation memerlukan infrastruktur yang andal, mencakup *platform* yang stabil, ruang penyimpanan yang memadai, serta sistem pengelolaan file yang memungkinkan akses dan keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, berbagai kendala teknis yang ditemui menunjukkan bahwa infrastruktur digital perpustakaan masih belum mampu mendukung praktik preservasi digital secara berkelanjutan dan sesuai standar internasional.

5. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Dari sisi sumber daya, perpustakaan hanya memiliki dua staf yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan layanan dan pengelolaan koleksi. Kondisi ini menyebabkan kemampuan institusi untuk melaksanakan program preservasi dan konservasi dalam skala besar menjadi sangat terbatas. Padahal, standar IFLA menegaskan pentingnya ketersediaan tenaga yang terlatih secara khusus dalam bidang preservasi, mengingat kegiatan ini memerlukan keahlian teknis, ketelitian, serta pengetahuan mengenai metode penanganan koleksi yang sesuai. Keterbatasan anggaran semakin mempersempit ruang gerak perpustakaan dalam menyediakan fasilitas, peralatan, maupun pelatihan yang memadai. Informan 1 menyebutkan bahwa:

“Kami kekurangan pustakawan dan anggaran yang memadai untuk mengoptimalkan proses preservasi dan konservasi di perpustakaan ini” (wawancara 3 Desember 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa persoalan sumber daya manusia dan pendanaan saling berkaitan dan menjadi hambatan struktural dalam pengembangan program preservasi. Tanpa dukungan staf yang kompeten dan pendanaan yang proporsional, perpustakaan berisiko hanya mampu menjalankan tindakan preservasi dasar, sehingga sulit mencapai standar ideal yang direkomendasikan oleh IFLA untuk pelestarian bahan

pustaka.

Berdasarkan seluruh temuan, dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan Sekretariat DPRD Sumatera Barat telah menjalankan sebagian prinsip dasar preservasi sesuai IFLA, terutama dalam hal pengendalian lingkungan, pembersihan, penyampulan, dan pemeriksaan fisik. Namun, aspek kebijakan, konservasi lanjutan, edukasi pemustaka, serta infrastruktur digital masih perlu ditingkatkan agar upaya pelestarian koleksi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan preservasi dan konservasi di Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah berjalan pada tingkat dasar melalui kegiatan rutin seperti penyampulan, perbaikan ringan, pemeriksaan fisik, serta pengendalian suhu dan kelembapan yang relatif sesuai dengan prinsip IFLA. Namun, upaya ini masih belum didukung oleh kebijakan atau SOP tertulis, belum mencakup konservasi lanjutan seperti fumigasi dan deasidifikasi, serta terkendala oleh keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas teknis, dan hanya dua pustakawan yang menangani seluruh pengelolaan koleksi. Selain itu, risiko kerusakan koleksi masih dominan disebabkan perilaku pemustaka, sementara program digitalisasi belum memenuhi standar pelestarian digital karena kendala kapasitas sistem dan ketidakstabilan situs web. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelestarian koleksi di perpustakaan masih memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penambahan fasilitas konservasi, regulasi penggunaan koleksi, serta pengembangan infrastruktur digital yang lebih andal agar pelestarian dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Referensi

- American Library Association-ALA.* (2023).
https://www.ala.org/acrl/standards/security_theft?utm_source
- Bahrudin, M. (2019). Membangun perpustakaan khusus yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lembaga induk: Best practices di Perpustakaan BSN. *Retrieved September, 9, 2021.*
- Elnadi, I. (2021). *Preservasi Dan Konservasi Sebagai Upaya Pustakawan Mempertahankan Koleksi Bahan Pustaka.* 1(2), 64–71.
- Fatmawati, E. F. E. (2018). Preservasi, konservasi, dan restorasi bahan perpustakaan. *Libria*, 10(1), 13–32.
- Ikegwuiro, P. U., Anthony, D. C., & Wyorkson, M. A. (2020). Preservation, Conservation and Safety of Library Materials: An Appraisal on Some Selected Special Libraries in Kaduna Metropolis. *International Journal of Knowledge Dissemination (IJKD)*, 1(2), 142–159.
- Ilmi, B., & Sulistyoningtyas, N. (2022). Strategi Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka Tercetak Di Perpustakaan STIE AUB (Adi Unggul Bhirawa) Surakarta. *EVOKASI: Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan*, 1(1).
<https://doi.org/10.20961/evokasi.v1i1.345>

- Kautsar, R., Ilhami, H., & Effendi, M. N. (2022). Preservasi bahan pustaka di Perpustakaan Umum Kota Banjarmasin. *Pustaka Karya : Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 10(1), 51. <https://doi.org/10.18592/pk.v10i1.6741>
- Makinde, O. O., Monu, J. O., Okusaga, T., & Ekeh, E. M. (2022). Organization, preservation and conservation of library materials: A case study of Lagos State University Library, Ojo-Lagos. *International Journal of Library and Information Science Studies*, 8(1), 19–32.
- Pratama, B. A., Ariyanti, N. N., & Rifauddin, M. (2025). Preservasi dan konservasi bahan pustaka cetak di perpustakaan universitas bojonegoro. *THE LIGHT : Journal of Librarianship and Information Science*, 5(1), 21–31. <https://doi.org/10.20414/light.v5i1.12036>
- Preservation and Conservation Section –IFLA. (2019). <https://www.ifla.org/units/preservation-and-conservation/>
- Ramadhiani, A., Khadijah, U. L., Rodiah, S., Cms, S., Rukmana, E. N., & Khoerunnisa, L. (2023). Evaluasi Preservasi Koleksi di Perpustakaan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. *ABDI PUSTAKA: Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan*, 3(1), 16–20. <https://doi.org/10.24821/jap.v3i1.8133>
- Srikana, N. P. W. R., Ginting, R. T., & Haryanti, N. P. P. (2023). Digitalisasi Koleksi Langka Di Upt. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Ilmiah Perpustakaan dan Informasi (JIPUS) Vol*, 3(2).
- Sudiarti, L., Hamka, & Rivai, F. H. (2023). Development strategy of human resource competency in the preservation field. *Record and Library Journal*, 9(2), 268–282. <https://doi.org/10.20473/rlj.V9-I2.2023.268-282>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Syahfitri, I. O. (2023). *Strategi Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka Tercetak di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/105843/>